

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi tak terlepas hakikatnya dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini merupakan bentuk implementasi pembangunan nasional yang mencakup asas berlakunya otonomi daerah. Salah satu tujuan adanya otonomi daerah adalah menjadi wadah pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di tingkat daerah, sehingga pemerintah daerah dituntut kreatif untuk bisa memanfaatkan berbagai sektor sumber daya yang ada (Sinaga, 2016; Fadliyanti et al., 2019).

Perbedaan sektor sumber daya merupakan salah satu faktor penentu arah kebijakan di setiap daerah. Ini dikarenakan arah kebijakan pembangunan ekonomi pada tingkat daerah harus berdasarkan kondisi aktual (Prishardoyo, 2008; Tri Basuki & Gayatri, 2009). Sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap kemajuan ekonomi daerah seharusnya menjadi sektor unggulan yang menjadi acuan kebijakan daerah. Hal ini penting karena penentuan sektor unggulan yang tidak tepat akan memperlambat pembangunan ekonomi suatu daerah (Monica et al., 2017).

Sektor unggulan berbasis kepada penggunaan sumber daya yang semakin terbatas membuat pemerintah harus bisa memilih dan memfokuskan pembangunan ke sektor yang mampu berkontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Dengan adanya penetapan suatu sektor unggulan di suatu daerah, diharapkan sektor tersebut bisa menghasilkan *multiplier effect* atas sektor ekonomi lain maupun perekonomian daerah secara total (Sinaga, 2016). Salah satu sektor yang potensial dikembangkan dan memberikan dampak *multiplier effect* adalah sektor pariwisata.

Sektor pariwisata memberikan dampak ekonomi nyata kepada masyarakat baik secara langsung, tidak langsung maupun induksi (A. P. Putra et al., 2017). Sektor ini telah menjadi sektor penunjang pembangunan ekonomi di Indonesia, tercermin dalam Nawacita Presiden Joko Widodo

yang berdampak kepada meningkatnya kesadaran akan peran sektor pariwisata di berbagai daerah yang mendorong adanya penetapan sektor pariwisata menjadi sektor unggulan berbagai daerah (Alhowaish et al., 2013; Kumala et al., 2017; P. G. B. N. P. Putra & Kartika, 2013; Rosa, 2019; Siregar, 2015; Sukriah, 2014). Ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata mampu memberikan dampak *multiplier effect* berupa terciptanya lapangan pekerjaan dan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi daerah. Sehingga saat ini berbagai daerah mulai berlomba lomba meningkatkan daya saing melalui pengembangan potensi sektor pariwisata (Rosa, 2019).

Salah satu provinsi dengan kekayaan potensi sektor pariwisata adalah Provinsi Lampung. Terletak di dua kawasan strategis ekonomi antara Sijori (Singapura-Johor-Riau) dan pusat ekonomi nasional (Jakarta), potensi sektor pariwisata Provinsi Lampung tersebar pada setiap kabupaten/kota yang terdiri atas 71 pulau kecil, 177 objek wisata alam dan 145 objek wisata budaya dan buatan. Berdasarkan hasil analisis SWOT, pariwisata Lampung memiliki kekuatan akan panorama alam dan budayanya yang begitu beragam yang tidak dimiliki semua daerah. Beberapa diantaranya bahkan sudah dikenal secara nasional dan internasional seperti Gunung Anak Krakatau, Taman Nasional Way Kambas hingga event *surfing* internasional Krui World Surf League (Meiridho et al., 2018; Rostiyati, 2013).

Hariyanti & Ariesta Utha (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sektor pariwisata di Provinsi Lampung merupakan salah satu sektor potensial yang diprediksi masih dapat berkembang. Sebagai gerbang penghubung masuknya wisatawan jalur darat dan laut dari Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni, Provinsi Lampung juga terkoneksi langsung dengan Jalan Tol Trans Sumatera yang merupakan proyek prioritas nasional penghubung Pulau Sumatera dari Lampung hingga Aceh dengan panjang keseluruhan 2.704 km. Saat ini Tol Trans-Sumatera masih dalam tahap konstruksi dan telah dibuka beberapa ruas. Ruas yang sudah dibuka dan melintasi Provinsi Lampung adalah Ruas Bakauheni - Terbanggi Besar dan Terbanggi Besar - Kayu Agung yang pada tahun 2019 telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (PT Utama Karya (Persero), 2021).

TABEL 1
DAFTAR GERBANG JALAN TOL TRANS-SUMATERA
DI PROVINSI LAMPUNG

Ruas	Gerbang Tol	Kabupaten/Kota
Bakauheni- Terbanggi Besar	Bakauheni Utara	Lampung Selatan
	Bakauheni Selatan	
	Kalianda	
	Sidomulyo	
	Lematang	
	Kotabaru	
	Natar	
	Tegineneng Barat	Pesawaran
	Tegineneng Timur	
	Gunung Sugih	Lampung Tengah
	Terbanggi Besar	
Terbanggi Besar-Kayu Agung	Gunung Batin	Tulang Bawang
	Menggala	
	Lambu Kibang	Tulang Bawang Barat
	Way Kenanga	Mesuji
	Simpang Pematang	
	Kayu Agung	Ogan Komering Ilir – Sumatera Selatan
Kayu Agung Utama		

Sumber: PT Utama Karya (Persero) (2021)

Dilalui oleh enam belas pintu gerbang Tol Trans-Sumatera, Provinsi Lampung memiliki peluang dalam menarik wisatawan datang berkunjung untuk melakukan aktivitas wisata. Adanya pembangunan ekonomi melalui jalan tol akan berpengaruh kepada efisiensi waktu, jarak dan juga biaya perjalanan termasuk perubahan pola perjalanan seseorang. Hasil studi Manurung (2020) pada Tol Soreang-Pasir Koja menunjukkan bahwa adanya jalan tol berpengaruh secara positif terhadap sektor pariwisata. Didukung oleh studi Suherlan (2008) pada Tol Cipularang dan Kasidi (2020) pada Tol Medan-Tebing Tinggi yang menunjukkan bahwa beroperasinya jalan tol berpengaruh positif terhadap pendapatan pelaku usaha pariwisata. Pembangunan ekonomi ini juga semakin dimaksimalkan dengan sedang dibangun kawasan pariwisata terintegrasi berskala internasional yaitu Bakauheni Harbour City yang termasuk dalam proyek prioritas nasional.

Hal ini tentunya mendorong pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata Provinsi Lampung yang tercermin melalui PDRB.

TABEL 2
PDRB SEKTOR PARIWISATA PROVINSI LAMPUNG

Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021*
Perdagangan dan Eceran	33.851,03	37.111,24	41.355,19	39.520,07	43.510,16
Penyediaan Akomodasi	121,95	138,06	151,53	137,67	135,74
Makan Minum	4.566,57	5.109,53	5.654,05	5.406,17	5.360,69

Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)

Berdasarkan tabel diatas, kontribusi PDRB sektor pariwisata Provinsi Lampung terlihat fluktuatif namun cenderung naik. Penurunan terjadi pada tahun 2020-2021 disebabkan adanya pembatasan kegiatan masyarakat selama pandemi COVID-19. Kendati demikian, sektor pariwisata terus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung dan pada triwulan II 2021 sektor pariwisata berkontribusi sebesar 6,69% (Badan Pusat Statistik, 2022). Peningkatan kontribusi ini didorong oleh keseriusan pemerintah provinsi yang terus melakukan berbagai upaya memaksimalkan potensi sektor pariwisata di setiap kabupaten/kota (Pardiana, 2021b).

Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi menyatakan bahwa sektor pariwisata dan ekonomi kreatif saat ini telah menjadi kekuatan baru di setiap daerah kab/kota di Provinsi Lampung dan terus didukung oleh percepatan pemangunan infrastruktur dan sarana penunjang bagi UMKM guna mendongkrak pertumbuhan sektor pariwisata di setiap kabupaten/kota bahkan dirangsang mulai dari tingkat desa melalui program Desa Wisata (Pardiana, 2021b; BAPPEDA Provinsi Lampung, 2021). Kebijakan lainnya adalah penetapan klaster prioritas pembangunan Provinsi Lampung yang mendukung pengembangan sektor pariwisata.

GAMBAR 1 KLASTER PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG



Sumber: (Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung & Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung, 2016)

Berdasarkan klaster tersebut, bagian barat Provinsi Lampung ditetapkan sebagai kawasan pariwisata. Sifat kepariwisataan yang multidimensi menjadikan pengembangan sektor ini sangat bergantung pada pengelolaan terpadu untuk mencapai tujuan pembangunan kepariwisataan yang diinginkan. Persada (2017) mengkaji pengembangan kepariwisataan di Provinsi Lampung dari sisi kelembagaan. Diperoleh hasil bahwa pengembangan kepariwisataan harus menjadi satu kesatuan pembangunan daerah yang terintegrasi. Oleh karena itu, perencanaan pariwisata perlu dicantumkan dalam dokumen RPJMD dan RTRW untuk setiap kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Ini juga menunjukkan bahwa diperlukan sinergi Pemerintah Provinsi Lampung untuk dapat memberikan perlakuan khusus kepada kabupaten/kota dengan sektor unggulan pariwisata. Adanya keistimewaan ini mendorong kabupaten/kota lainnya turut meningkatkan dan mengembangkan potensi wisata setiap daerah di Provinsi Lampung (Yasland & Aini, 2019).

Penetapan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan pada tingkat kabupaten/kota akan menstimulus peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan yang juga didorong oleh adanya pembangunan ekonomi. Hal ini terkait adanya perolehan alokasi anggaran pembangunan

sektor unggulan yang lebih besar dibandingkan sektor lainnya (Nurkholis & Brodjonegoro, 2003). Bila penetapan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan dilakukan kepada daerah yang tidak potensial, maka akibatnya akan terjadinya perlambatan pembangunan ekonomi daerah. Sehingga diperlukan adanya kajian lebih lanjut dengan pendekatan ekonomi pembangunan mengenai analisis potensi sektor pariwisata sebagai sektor unggulan pada setiap kabupaten/kota guna mendorong pembangunan ekonomi Provinsi Lampung.

Berdasarkan fenomena sebagaimana yang dijelaskan bahwa potensi sektor pariwisata yang dikembangkan pada setiap kabupaten/kota saat ini tercermin dalam peningkatan PDRB Sektor Pariwisata yang didukung dengan adanya Jalan Tol Trans-Sumatera dan Bakauheni Harbour City sebagai proyek prioritas nasional. Adanya pembangunan ekonomi ini akan mendorong perubahan struktur ekonomi di Provinsi Lampung terkhusus terhadap sektor pariwisata. Sehingga penelitian ini perlu dilakukan sebagai bentuk pembaharuan dari studi oleh Hariyanti & Ariesta Utha (2016) serta menindaklanjuti studi oleh Persada (2017) terkait pemetaan potensi ekonomi lokal sektor pariwisata sebagai sektor unggulan pada tingkat kabupaten/kota. Oleh karena itu peneliti memilih judul penelitian **“Analisis Potensi Sektor Pariwisata Provinsi Lampung”**.

B. Rumusan Masalah

Peningkatan PDRB Sektor Pariwisata Provinsi Lampung didorong oleh upaya pemerintah daerah melakukan berbagai cara memaksimalkan potensi sektor pariwisata di setiap kabupaten/kota. Hal ini terbukti dengan adanya program bantuan kepada para pelaku UMKM dan sektor pariwisata, percepatan pembangunan infrastruktur pariwisata, hingga adanya program desa wisata di setiap kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Provinsi Lampung menjadikan sektor pariwisata sebagai alat pemerataan pembangunan ekonomi daerah hingga ke tingkat desa. Adanya keterbatasan sumber daya setiap daerah membuat penetapan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan kabupaten/kota harus berdasarkan

kajian khusus supaya mampu memberikan *multiplier effect* kepada sektor ekonomi lain maupun perekonomian Provinsi Lampung secara total.

Adanya pembangunan ekonomi melalui Jalan Tol Trans-Sumatera dan Bakauheni Harbour City juga mendorong adanya perubahan struktur ekonomi di Provinsi Lampung yang memperlihatkan pertumbuhan positif terhadap sektor pariwisata. Kajian mengenai sektor pariwisata sebagai sektor unggulan di Provinsi Lampung telah dilakukan oleh Hariyanti & Ariesta Utha (2016) serta Persada (2017) yang menghasilkan rekomendasi perlu dilakukannya studi sektor unggulan pariwisata pada tingkat kabupaten/kota sehingga pembangunan ekonomi sektor pariwisata di Provinsi Lampung tidak terkesan euforia semata dan dapat dilakukan secara terintegrasi. Untuk itu rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kondisi basis ekonomi sektor pariwisata di setiap kabupaten/kota berdasarkan *Location Quotient*?
2. Bagaimana pergeseran struktur ekonomi sektor pariwisata di setiap kabupaten/kota berdasarkan *Shift Share*?
3. Bagaimana pertumbuhan sektor pariwisata di setiap kabupaten/kota berdasarkan Model Rasio Pertumbuhan?
4. Bagaimana potensi sektor pariwisata di setiap kabupaten/kota berdasarkan *Overlay*?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis kondisi basis ekonomi sektor pariwisata di setiap kabupaten/kota berdasarkan *Location Quotient*
2. Menganalisis pergeseran struktur ekonomi sektor pariwisata di setiap kabupaten/kota berdasarkan *Shift Share*
3. Menganalisis pertumbuhan sektor pariwisata di setiap kabupaten/kota berdasarkan Model Rasio Pertumbuhan
4. Menganalisis potensi sektor pariwisata di setiap kabupaten/kota berdasarkan *Overlay*

D. Keterbatasan Penelitian

Ruang lingkup pembangunan ekonomi dan sektor pariwisata yang luas membuat penulis membatasi penelitian pada potensi ekonomi sektor pariwisata yang ditinjau melalui PDB/PDRB berdasar lapangan usaha 15 Kab/Kota di Provinsi Lampung, Provinsi Lampung dan Indonesia pada periode tahun 2017-2021.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan literatur studi kajian selanjutnya mengenai sektor pariwisata terhadap pembangunan ekonomi di Provinsi Lampung maupun di setiap kabupaten/kota.
2. Sebagai sumber data dan bahan pertimbangan pengambilan keputusan pemerintah dalam penetapan strategi dan perencanaan pengembangan sektor unggulan di Provinsi Lampung maupun di setiap kabupaten/kota.